

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis pemerintah daerah atas kinerja keuangan yang dicapai, dalam upaya konkrit mewujudkan transparansi dana dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah (Prasetya, 2005). Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Lembaga DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (Suwardjono, 2015: 164–177). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas (Nurillah, 2014).

Mengamati perkembangan fenomena Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah/Kota di Indonesia, ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli. Abdul Hafiz Tanjung (2018: 13-15) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan melalui informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, dengan indikatornya yaitu (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami. Mengenai indikator-indikator tersebut, Ifat Fauziah (2018: 32-34) menjelaskan bahwa laporan keuangan dikatakan *relevan* apabila informasinya dapat

mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang *andal* apabila memenuhi karakteristik berupa penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan mencerminkan netralitas. Informasi laporan keuangan akan lebih berguna lagi apabila *dapat dibandingkan* dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya. Informasi laporan keuangan *dapat dipahami* oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang sesuai dengan batas pemahaman para pengguna.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan suatu entitas dalam hal ini pemerintah daerah. *Pertama*, Vandenberg (1992) dalam Stasya Meyly Tingginehe dkk (2021: 1354) menyatakan bahwa faktor Komitmen Organisasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Komitmen Organisasi adalah loyalitas karyawan dan adanya keinginan untuk ikut terlibat dalam organisasi, serta berusaha meningkatkan organisasi, sehingga informasi pembuatan laporan keuangan bisa dioptimalkan. Indikatornya: (1) Identifikasi, (2) Keterlibatan, dan (3) Loyalitas.

Kedua, Widodo (2001), dalam RizkiAfri Mulia (2018: 11) menyatakan bahwa faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kompetensi SDM adalah kemampuan sumber daya manusia melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Indikatornya: (1) Latar belakang pendidikan, (2) Diklat, dan (3) Pengalaman.

Ketiga, I Gusti Agung Rai (2008) dalam Wirmie Eka Putra (2017: 285), menyatakan bahwa faktor Sistem Pengendalian Intern mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sistem Pengendalian Intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Indikatornya: (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko, dan (3) Informasi dan Komunikasi.

Keempat, Bastian (2006), dalam Nonce Dian (2017: 131), menyatakan bahwa faktor Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mempengaruhi kualitas laporan keuangan. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, serta merupakan persyaratan yang berkekuatan hukum dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Indikatornya: (1) Akuntabilitas, (2) Manajemen, dan (3) Transparansi.

Di samping teori tersebut, ditampilkan juga lima fenomena riset mutakhir sejak tahun 2017 sampai 2021. Semuanya diambil dari berbagai daerah/kota yang tersebar di Indonesia. *Pertama*, hasil riset Stasya Meily Tingginehe dkk (2021) menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi, Penggunaan Teknologi, Penerapan SAP dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, sedangkan Penerapan SPIP tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Kedua*, hasil riset Rizki Afri Mulia (2018) menunjukkan

bahwa Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. *Ketiga*, hasil riset Wirmie Eka Putra (2017) menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah Kota Jambi. *Keempat*, hasil riset Gusrya Indria Sari, Fadli (2017) menunjukkan bahwa Penerapan *Good Governance*, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Kelima*, hasil riset Nonce Dian (2017) menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sedangkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berbeda dari riset-riset yang sudah dikemukakan, saya ingin meneliti dan menguji pengaruh empat faktor tersebut terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Kupang untuk membandingkannya dengan hasil riset yang sudah dilakukan di daerah/kota lain di Indonesia. Studi saya di Pemerintahan Kota Kupang jika dibandingkan dengan riset mereka, selain perbedaan terletak pada tempat, konfigurasi variabel dan analisis statistik juga berbeda.

Fakta yang terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Kupang menunjukkan bahwa masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan BPK dalam pelaksanaan audit LKPD Pemerintah Kota Kupang.

Berdasarkan Siaran Pers BPK Tahun Anggaran 2016-2018, Pemerintah Kota Kupang mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini WDP adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian (Nurillah, 2014). Terdapat kelemahan mengenai verifikasi, monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Dana BOS yang belum optimal, tidak akuratnya pencatatan Laporan Keuangan, adanya perbedaan nilai pencatatan Aset Tetap antara Bidang Akuntansi dan Aset dengan OPD, serta ketidaksesuaian pencatatan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk Tahun Anggaran 2019-2020, BPK memberikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang, namun BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pencatatan Laporan Keuangan.

Dari fenomena-fenomena yang telah dijelaskan, tampak bahwa laporan keuangan pemerintah daerah/kota, termasuk kota Kupang, belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. Mengingat karakteristik kualitatif merupakan unsur penting Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/Kota sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang memang sudah cukup berkualitas, namun ada catatan-catatan yang perlu dikaji untuk meningkatkan kualitasnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya tertarik melakukan penelitian dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana gambaran Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang?
2. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
4. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
5. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui gambaran Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui signifikansi antara Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

3. Untuk mengetahui signifikansi antara Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
4. Untuk mengetahui signifikansi antara Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
5. Untuk mengetahui signifikansi antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi berbagai pihak.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk memperkaya khasanah teori-teori mata kuliah akuntansi dan manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira di Kupang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Kupang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak dalam melaksanakan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan pembangunan Kota Kupang khususnya.